

**TESIS**

**KONSEKUENSI YURIDIS PENYIMPANGAN KEWENANGAN  
DALAM IMPLEMENTASI *INFORMED CONSENT* DIGITAL**

***JURIDICAL CONSEQUENCES OF AUTHORITY  
IRREGULARITIES IN THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL  
INFORMED CONSENT***



**Oleh :**

**ROSI WULANDARI**

**NIM. 2210622104**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
2026**

**TESIS**

**KONSEKUENSI YURIDIS PENYIMPANGAN KEWENANGAN  
DALAM IMPLEMENTASI *INFORMED CONSENT* DIGITAL**

***JURIDICAL CONSEQUENCES OF AUTHORITY  
IRREGULARITIES IN THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL  
INFORMED CONSENT***



**Oleh :**

**ROSI WULANDARI  
NIM. 2210622104**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
2026**

**HALAMAN JUDUL**

**KONSEKUENSI YURIDIS PENYIMPANGAN KEWENANGAN  
DALAM IMPLEMENTASI *INFORMED CONSENT* DIGITAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh :  
**ROSI WULANDARI**  
**2210622104**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
2026**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **KONSEKUENSI YURIDIS PENYIMPANGAN KEWENANGAN DALAM IMPLEMENTASI *INFORMED CONSENT* DIGITAL**

Disusun dan diajukan oleh:

**ROSI WULANDARI**

**NIM. 2210622104**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal

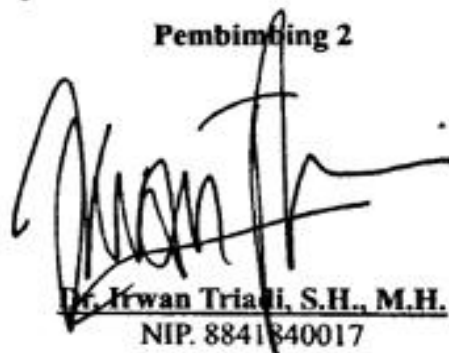
Menyetujui:

**Pembimbing 1**



**Dr. Slamet Triwahyudi, S.H., M.H.**  
NIP. 0027018603

**Pembimbing 2**



**Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.**  
NIP. 8841840017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904

Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

KONSEKUENSI YURIDIS PENYIMPANGAN KEWENANGAN  
DALAM IMPLEMENTASI *INFORMED CONSENT* DIGITAL

Disusun dan diajukan oleh:

**ROSI WULANDARI**

**NIM. 2210622104**

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

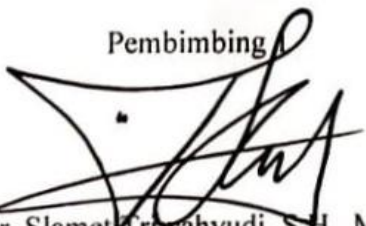
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 09 Juli 2026

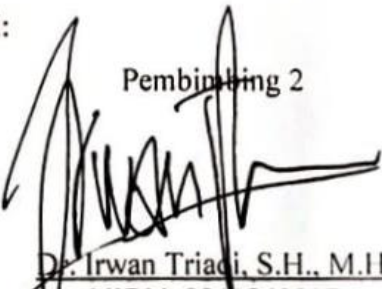
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

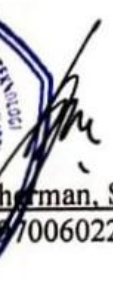
Pembimbing 1

  
Dr. Slamet Triwahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 198601272024061001

Pembimbing 2

  
Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H.  
NIDN. 8841840017

Dekan Fakultas Hukum

  
  
Dr. Sahirman, S.H., LL.M.  
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi  
Magister Hukum

  
Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I.,  
S.H., M.H.  
NIP. 198910192025211048

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rosi Wulandari  
NIM : 2210622104  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **"Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan Dalam Implementasi Informed Consent Digital"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Rosi Wulandari

NIM. 2210622104

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosi Wulandari  
NIM : 2210622104  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan dalam implementasi *Informed Consent Digital*”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Rosi Wulandari  
NIM. 2210622104

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhānahu wa Ta‘ālā serta bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
3. Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H, Koordinator Program Studi Hukum Program Magister
4. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. dan Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama penyusunan tesis ini
5. Ibu Hepi Len Rozasih, S.Sos ibunda tercinta, terimakasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang, nasihat, serta dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis
6. Dimas Adam Rakasia, S.H suami terbaik yang telah membantu, mendukung baik moril dan materil serta mendampingi dengan penuh kesabaran agar penulis mencapai gelar magister hukum
7. Anak Arvasya Ezaz Diraya, sumber penyemangat pencipta senyum dan tawa



8. Seluruh jajaran direksi dan direktur RS Permata Mufidah Grup atas kesediaan diberikan izin melanjutkan pendidikan jenjang magister.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.

Jakarta, 10 Juli 2026

Penulis

Rosi Wulandari

## ABSTRAK

### **Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan Dalam Implementasi Informed Consent Digital**

Rosi Wulandari (2210622104), dibimbing oleh Slamet Triwahyudi sebagai Pembimbing Utama, dan Irwan Triadi sebagai Pembimbing Pendamping.

Transformasi digital dalam sektor kesehatan memberikan perubahan signifikan khususnya dalam rekam medis, Seluruh administrasi rumah sakit beralih menjadi elektronik termasuk *Informed Consent*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum tentang Informed Consent dapat di implementasikan tanpa celah penyimpangan dan mampu melindungi profesi kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni menganalisis norma norma pada peraturan perundang undangan terkait *Informed Consent* serta mengkaji dengan identifikasi tantangan serta kendala implementasi *Informed Consent* digital yang dapat menimbulkan resiko kekeliruan dalam pencatatan digital. Hasil penelitian menunjukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pasal 182 mengisyaratkan implementasi *Informed Consent* yang merupakan kewenangan seluruh prosesnya dilekatkan kepada dokter selaku subyek yang melakukan tindakan medis justru dapat dilimpahkan kepada tenaga kesehatan lainnya yang tidak memiliki kompetensi serupa. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dan kekeliruan yang memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari apabila mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi pasien. Perlu adanya pedoman yang sesuai dan efektif untuk mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang persetujuan *informed consent* secara digital dalam konteks pelayanan kesehatan modern melalui penambahan substansi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pasal 182 agar memberikan penguatan kepastian hukum dan perlindungan profesi dokter dalam sistem kesehatan nasional untuk dapat dilaksanakan secara patuh dan seragam di seluruh penyedia fasilitas kesehatan.

**Kata Kunci:** Persetujuan Tindakan Medis, Kewenangan, Konsekuensi.

## **ABSTRACT**

### ***Juridical Consequences of Authority Irregularities in the Implementation of Digital Informed Consent***

Rosi Wulandari (2210622104), supervised by Slamet Triwahyudi as Main Supervisor, and Irwan Triadi as Associate - Supervisor.

*Digital transformation in the healthcare sector has brought about significant changes, particularly in medical records. All hospital administrative processes have shifted to electronic systems, including informed consent. This study aims to analyze whether legal regulations regarding informed consent can be implemented without loopholes or irregularities and are capable of protecting the medical profession. This study employs a normative legal method, which involves analyzing the norms in laws and regulations related to informed consent and examining the challenges and constraints in implementing digital informed consent that could lead to errors in digital record-keeping. The results of the study indicate that Article 182 of Minister of Health Regulation No. 13 of 2025 on the Management of Health Human Resources implies that the implementation of informed consent—whose entire process is typically the responsibility of the physician as the subject performing the medical procedure—can in fact be delegated to other healthcare workers who lack equivalent competencies. This has the potential to cause errors and mistakes that could lead to legal consequences in the future if they result in material and immaterial losses for patients. There is a need for appropriate and effective guidelines to regulate the implementation of the delegation of authority for digital informed consent in the context of modern healthcare services by adding provisions to Article 182 of Minister of Health Regulation No. 13 of 2025 on the Management of Healthcare Human Resources, in order to strengthen legal certainty and protect the medical profession within the national health system, ensuring that these guidelines are implemented in a compliant and uniform manner across all healthcare facilities .*

**Keywords:** *Informed Consent, Authority, Irregularities.*

## DAFTAR ISI

|                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------|---------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                   | i       |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                    | ii      |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....           | iii     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....     | iv      |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....              | v       |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> ..... | vi      |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | vii     |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | ix      |
| <b>ABSTRACT</b> .....                         | x       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | xi      |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                  |         |
| A. Latar Belakang.....                        | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                       | 6       |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 6       |
| D. Kegunaan Penelitian.....                   | 6       |
| E. Orisinalitas Penelitian.....               | 7       |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>            |         |
| A. Kajian Teoritis.....                       | 14      |
| B. Kerangka Pikir.....                        | 34      |
| C. Definisi Operasional.....                  | 34      |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b>          |         |
| A. Tipe Penelitian.....                       | 37      |
| B. Jenis dan Sumber Data.....                 | 38      |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....               | 39      |
| D. Analisis Bahan Hukum.....                  | 39      |

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Implementasi Informed Consent Digital .....                                                          | 40 |
| B. Konsekuensi yuridis penyimpangan kewenangan dalam implementasi <i>Informed Consent</i> Digital ..... | 66 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 80 |
| B. Saran .....      | 81 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>82</b> |
|----------------------------|-----------|